DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Kepala BNPB RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 6 April 2020.
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB.
Tempat	:	Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	:	1. Prioritas penanggulangan Covid 19 di Indonesia 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya.
Ketua Rapat	:	**H.YANDRI SUSANTO, SPt.**
Sekretaris Rapat	:	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	:	1. 48 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala BNPB beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 12.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI secara virtual bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan agenda "**Prioritas Penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Membahas Isu-isu Aktual lainnya"**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan penambahan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2020 sebesar Rp 3.300.000.000 (*Tiga Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah*) untuk penanganan Covid-19 dan anggaran operasional BNPB, selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan kepada Komisi VIII DPR RI mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.
2. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kepala BNPB / Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna melakukan sinkronisasi data, pemetaan termasuk *rapid test* persebaran Covid-19 untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.
3. Komisi VIII DPR RI bersama Kepala BNPB / Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sepakat untuk melakukan percepatan pembahasan terhadap Revisi Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan melakukan penguatan fungsi kelembagaan, aspek anggaran yang harus disediakan dalam APBN dan APBD, serta pengaturan penanganan bencana non-alam.
4. Komisi VIII DPR RI siap bekerjasama dengan Kepala BNPB / Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam mempercepat distribusi masker, *hand sanitizer*, disinfektan maupun Alat Perlindungan Diri (APD) untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di berbagai daerah.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB / Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar dalam pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
   a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD) khususnya bagi dokter dan paramedis yang berjuang di barisan terdepan dalam melawan Covid-19 serta memberikan penghargaan kepada mereka yang telah meninggal.
   b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 untuk mengurangi dampak sosial di tengah masyarakat, seperti memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan penanganan Covid-19.

c. Menjalin sinergi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Pers/Media, dunia usaha dan berbagai *stakeholder* untuk secara bersama-sama proaktif melakukan sosialisasi agar masyarakat menjaga jarak (*Physical Distancing*), sering cuci tangan dengan sabun dan tidak berada dalam kerumunan serta mencegah penyebaran hoax mengenai bencana karena menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

d. Mendukung langkah cepat Gugus Tugas melakukan penanganan masyarakat yang terpapar virus, memutus mata rantai pesebaran virus dan menyusun *emergency plan*.

e. Memobilisasi segala sumber daya nasional khususnya dalam bidang riset sehingga mampu memiliki data-data *forecasting* yang lebih akurat dan terukur.

f. Menetapkan satu komando atau satu koordinasi dalam pengendalian bencana Covid-19 yang lebih jelas sehingga penanganan Covid-19 berjalan tidak parsial dan terus terkoordinasi dengan baik.

g. Menyerukan dzikir nasional untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari wabah Covid-19 dengan dipimpin oleh Wapres RI sebagai tokoh ulama, termasuk agama dan kepercayaan lainnya.

h. Menyampaikan komunikasi dengan narasi yang humanis, optimis, solutif dan satu komando seperti yang menggambarkan satu lokomotif.

6. Komisi VIII DPR RI meminta kepada BNPB untuk memberikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan dari anggota Komisi VIII yang belum dijawab.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.17 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,

H.YANDRI SUSANTO, SPt.